

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), cetakan ke-IV
- Effendie Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Fakhriah Efa Laila, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2013), Cetakan ke-2
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam* (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Panggabean Henry, *Fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari-hari*, (Jakarta. Sinar Harapan, 2001)
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984)
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I (Bandung: Alumni, 1992)
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991),
- Sugeng Bambang dan sujayadi, *pengantar Hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi*, (Jakarta: penadamedia group, 2015), cetakan ke-3
- Sutantio Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995.)
- As`ad Abd. Rasyid 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http:// fakultas hokum darussalam. blogspot. com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html>, di akses pada 18 mei 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Offline Versi 1.5, dalam <http:// www. Ketikan komputer. com/2013/03/download-kamus-besar-bahasa-indonesia.html>, dikses pada tanggal 11 juli 2020.

Satria Rio, *Persidangan secara elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama*, <https://drive.google.com/file/d/12kmycu4ddenk5dld07dulrukyd7bdvt/view>, diakses pada (13/03/2020).

Aidi Zil, implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.1, Januari 2020

Waluyo Bernadette Mulyati, Asas terbuka untuk umum dan kehadiran fisik para pihak dalam sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 6, No.1, 2020.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.